

# **PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI BANGKALAN MADURA**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah**



**Oleh:**

**Nur Hakim**

**NIM: F520915027**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Nur Hakim

Nim : F520915027

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 12 April 2019

Saya yang menyatakan



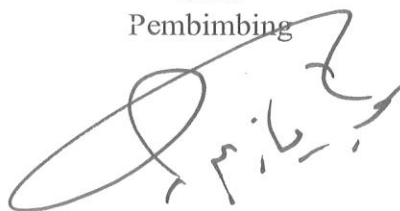
Nur Hakim

## PERSETUJUAN

Tesis Nur Hakim ini telah disetujui

Pada tanggal 16 Agustus 2018

Oleh  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suis', written over a horizontal line.

Dr. H. SUIS, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

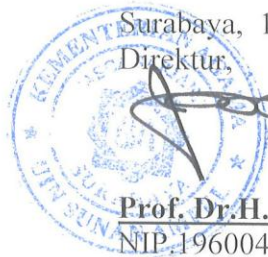
## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nur Hakim ini telah di uji  
pada tanggal 16 januari 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Ketua Penguji) .....  
NIP.196201011997031002
2. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Penguji Utama) .....  
NIP. 195601031985031002
3. Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag (Penguji) .....  
NIP. 197110212001121002

Surabaya, 12 April 2019  
Direktur.



Prof. Dr.H.Aswadi,M.Ag  
NIP.196004121994031001



Scanned with  
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Hakim  
NIM : F520915027  
Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah  
E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI  
BANGKALAN MADURA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2019

Penulis

( Nur Hakim )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Nama : Nur Hakim  
Judul Tesis : Peran Komunitas Pemuda Dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Kabupaten Bangkalan Madura  
Pembimbing : Dr. H. Suis, M.Fil.I  
Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi di bangkalan memiliki banyak komunitas satu di antaranya komunitas pemuda, komunitas pemuda sendiri tergolong banyak organisasi. Ada organisasi yang terstruktur secara nasional sampai ke desa seperti Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Ada yang terstruktur secara nasional sampai ke kabupaten kota seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ada pula yang hanya berstruktur lokal seperti Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR), Madura *Corruption Watch* (MCW), *Centre Of Islamic And Democration Studie's* (CIDE), Pemuda Bangkalan Bersatu (PBB),

Temuan korupsi di bangkalan terindikasi pada kuatnya relasi para penguasa lokal, dan hal tersebut menjadi rahasia umum di kabupaten bangkalan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat peran komunitas pemuda dalam memerangi korupsi yang akut di kabupaten bangkalan dengan sector pendidikan anti korupsi. Peneliti menggunakan metodolodi kualitatif dengan model etnografis yang menekankan pada pengalaman dan obyektifitas.

Peneliti fokus pada teori relasi kekuasaan, teori motif sosial dan pendidikan anti korupsi dalam melakukan penelitian, sebab korupsi di kabupaten bangkalan termasuk korupsi yang akut. Korupsi yang terjadi begitu massif dan berjamaah. Bukan hanya pejabat publik pemerintahan kabupaten tetapi sampai pada ke akar rumput. Malah yang lebih parah korupsi sudah menjadi trend dan gaya hidup para pemangku jabatan hal tersebut juga banyak di pengaruhi oleh kuatnya relasi dan ada motif sosial dalam melakukan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
TRANSLITERASI .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	14









u “kebiasaan” . berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mpsi dan hukum yang sangat jelas, namun, tetap saja korupsi masih mri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana u karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. T tidak bisa menyandarkan para karuptor karena mereka sudah asa dengan tindakannya tersebut .

Jadi , salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk psi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada rasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi per nggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karen a sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan disekitarnya. Jadi,

Korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela bahkan telah menjadi suatu “kebiasaan” . berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat jelas, namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyandarkan para karuptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut .

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk

mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis, yang berarti tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat kedalam sistem menjadi bagian dari operasional sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apapun.

Adanya KPK sebagai lembaga Negara yang menangani khusus terkait tindak pidana korupsi itu semakin mengafirmasi bahwa negara kita tercinta ini dihuni oleh warga yang korup, permasalahannya bukan karena Negara Indonesia tidak mempunyai Undang-Undang maupun aturan yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan, sudah banyak Undang-Undang maupun peraturan yang dibuat oleh eksekutif dan legislative dalam mencegah dan menindak para pelaku korupsi, namun entah kenapa korupsi di Indonesia masih saja terjadi dimana-mana.

Problem utama di Indonesia ini adalah ketidakterbukanya sistem dan jalannya pemerintahan, sehingga dengan situasi masyarakat yang tertutup tersebut akan memudahkan para pelaku korupsi melakukan konspirasi-konspirasi korupsi, Bangkalan contohnya Bangkalan adalah sebuah kabupaten di pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura, Berbatasan dengan Laut Jawa di utara, kabupaten Sampang di timur serta selat Madura di selatan dan barat.

Bangkalan merupakan daerah yang tertinggal No. 2 di Jawa Timur dalam masalah SDM, maupun SDA nya, sehingga daerah bangkalan dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah tertutup, banyak contoh para tokoh di Bangkalan

Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama Korupsi. Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur sudah tidak terbantahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi terjadi dari pagi hingga tengah malam, dari mulai pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan kuburan, dari mulai sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan, dari pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan.

Seperti kasus yang terjadi pada mantan Bupati Bangkalan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ini ditangkap atas dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Diduga penyusunan dilakukan Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko melalui perantara pemberi Koprak Satu TNI AL Darmono. Penangkapan Fuad Amin merupakan rangkaian OTT Senin (1/12)

Kasus itu memberi cerminan bahwa kota santri system dan budaya korupsi masih menggurita. Bahkan anehnya lagi, korupsi dilakukan oleh sosok yang menyandang title Kiai. Hal itu membuktikan bahwa pendidikan anti korupsi pun juga tak memberi efek apa-apa pada budaya potong memotong, setor menyeter uang rakyat oleh pengusaha pada penguasa.

Begitu juga dalam pendidikan, secara jelas pemerintah melalui kemendikbud telah memasukan pendidikan anti korupsi ke dalam SD, SLTP dan SMA, tapi kenapa karakter bangsa ini masih belum berubah, terutama di Bangkalan.

pemuda mampu memerankan dirinya sebagai tameng bagi jahatnya korupsi. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengangkat isu-isu tersebut dengan judul **“PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI BANGKALAN”**, harapan menemukan formulasi dan skema dalam melawan tradisi korupsi.

### B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi Latar belakang di atas, serta untuk memper mudah dan menghasilkan penelitian yang utuh, komprehensif dan sistematis. Maka peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana program komunitas pemuda dalam pendidikan anti korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan program komunitas pemuda dalam pendidikan anti korupsi?
3. Bagaimana implikasi pendidikan anti korupsi oleh komunitas pemuda di kabupaten Bangkalan Madura?

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya interpretasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi riset. Tujuan dari riset ini adalah:

- #### D. Manfaat Penelitian

## 1. Manfaat teoritis

## 2. Manfaat praktis



dalam membentuk jiwa generasi muda yang anti korupsi dan melawan ketidakadilan.

Manfaat selanjutnya adalah bagi masyarakat dapat memberikan landasan berpikir, tahapan berpikir, dan implementasi pentingnya pendidikan anti korupsi dalam membentuk mental pejuang anti korupsi.

## E. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menggunakan pendekatan Teori Komunitas, Teori Keterlibatan Publik, Teori Relasi Kekuasaan, Teori Motif Dan Pendidikan Anti Korupsi.

## 1. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi ialah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta beberapa nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Oleh sebab itulah pendidikan anti korupsi pada dasarnya ialah penanaman

Departemen pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan antikorupsi disekolah untuk memberikan pemahaman kepada pemuda bagaimana pemuda dapat membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argument yang logis dan rasional kepada korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi.<sup>3</sup>

Diskursus mengenai kekuasaan menjadi suatu hal yang tidak pernah basi dan selesai untuk didiskusikan. Hal ini telah dimulai sejak zaman Yunani kuno dan terus berlangsung sampai zaman ini. Para filsuf klasik pada umumnya mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan dan kebebasan. Banyak perspektif tentang kekuasaan, salah satunya para filsuf religious, mereka menghubungkan itu dengan masalah Tuhan. Kekuasaan politik hanya sebagai alat untuk mengabdikan tujuan negara yang dianggap

<sup>3</sup> Ibid.,

### 3. Teori Motif Sosial







## KORUPSI

# KORUPSI DI INDONESIA



Negara yang kaya seperti Indonesia seharusnya dapat mensejahterakan warga negaranya, namun APBN kurang lebih Rp 1.047,7 Triliun pada tahun 2010 sepertinya tidak memiliki dampak yang signifikan karena lebih banyak dihabiskan untuk anggaran rutin bukan pembangunan, terlebih lagi sangat banyak terdapat kebocoran anggaran. Birokrat, aparat penegak hukum, dan politisi merupakan penikmat kebocoran anggaran terbesar. Tidak heran maka Transparency International pada tahun 2010 lalu melakukan riset dan mendapatkan bahwa tahun 2010 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah 2,8. Seajar dengan Negara seperti benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands yang sama-sama punya skor 2,8 dan berada dalam urutan 110. Indonesia kalah dengan negara-negara tetangga yang skornya lebih baik seperti Singapore (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5).

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai



### b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>12</sup> Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang sudah tersedia. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran online, *browsing* data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi Organisasi kemahasiswaan, LSM Se-bangkalan

Sehingga sumber data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data triangulasi yaitu, teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama serempak. Adapun pengertian dan tujuan dari ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik yaitu tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek- obyek alam yang lain.<sup>14</sup> Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini

<sup>12</sup>Ibid., Hlm. 91

<sup>13</sup>Ibid., Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Hlm. 330

<sup>14</sup> Ibid., Hlm. 203



data untuk mengetahui bagaimana Organisasi kemahasiswaan, LSM Sebangkalan menerapkan pendidikan anti korupsi

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip Organisasi kemahasiswaan, LSM Se-bangkalan yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya.

### C. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi keseluruhan tesis ini, maka peneliti merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN : yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan

BAB II. LANDASAN TEORI : meliputi tinjauan teoritis yang meliputi peran pemuda dan pendidikan Karakter Anti Korupsi, relasi kekuasaan, kekuatan komunitas (civil society). Dan keterbukaan publik.

BAB III. METODE PENELITIAN : berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian., tahap-tahap penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan ke absahan data

BAB IV. PAPARAN DATA DAN TEMUAN HASIL PENELITIAN :

membahas hasil penelitian sebagai berikut: (sesuai rumusan masalah)

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran –saran bagi pihak yang berkepentingan.

## KOMUNITAS PEMUDA DAN PROGRAM PENDIDIKAN

## ANTI KORUPSI

### A. Komunitas

Komunitas merupakan bahasa latin *communitas* yang berarti “kesamaan”. Kemudian disebut dengan *communis* yang berarti sama, atau publik. Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme berbagai lingkungan. Dalam komunitas manusia sendiri, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan jumlah kondisi lain yang serupa. Dengan kata lain, komunitas ialah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.<sup>18</sup> Dalam ungkapan yang lain komunitas merupakan sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antara para anggota komunitas tersebut, sebab terdapat sebuah kesamaan interest atau values.<sup>19</sup>

Menurut Mac Iver *community* merupakan sebuah istilah sebagai persekutuan hidup atau peguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat

<sup>18</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja. (2012. Jakarta : Raja Grafindo Persada) 53

<sup>19</sup>Agoes Patub B.N, Modul Seminar “Peran Komunitas Musik Etnik Dalam Agoes Patub B.N” (2011. Yougyakarta : Komunitas Suling Bambu Nusantara)







1. *Gemeinschaft by blood*, hubungannya didasarkan pada ikatan darah atau keturunan.
2. *Gemeinschaft of place*, hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal atau kesamaan lokasi
3. *Gemeinschaft of mind*, hubungannya didasarkan pada kesamaan ideologi meskipun tidak memiliki ikatan darah maupun tempat tinggal yang berdekatan.

1. *Primary Group*. Hubungan antara anggota komunitas lebih intim dalam jumlah anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama. Misalnya keluarga, suami-istri, pertemanan, guru-murid, dan lainnya

<sup>26</sup>Mansur, *Desa dan Kota*,..... 80-81

### B. Pemuda

Terdapat banyak definisi terhadap pemuda, baik definisi secara fisik maupun secara psikis tentang siapa figur yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia. Sedangkan menurut Taufiq Abdullah (1974;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang

*“the time of life between childhood and maturity’ early maturity’ the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality charecteristic of a young person”*

Sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa “pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

Menurut Taufiq Abdullah (1974:38) ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi :

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang menyambung, tetapi fragmentaris, terpecah-pecah dan setiap

Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu objek dalam hidup, tentulah memiliki nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

1. Kemurnian idealismenya
2. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru
3. Semangat pengabdian
4. Spontanitas dan dinamikanya
5. Inovasi dan kreativitasnya
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri

- Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia, sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharuan dan progresif.

Pendidikan anti korupsi merupakan program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi ialah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta beberapa nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Oleh sebab itulah pendidikan anti korupsi pada dasarnya ialah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap anti korupsi pada diri peserta didik.<sup>27</sup>

<sup>27</sup>Syaiful Amin Ghafur, Merancang Kurikulum Pendidikan Antikorupsi (Jurnal Pendidikan Islam, Vol, 01, No. 01, Juni 2009 ISSN 2085-3033)

Hal yang sama dinyatakan oleh Dharma (2003) secara umum tujuan pendidikan antikorupsi ialah :

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi

Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagai dikemukakan oleh Bloom yaitu pengembangan ranah kognitif, efektif dan psikomotor pemuda.

Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), terdapat sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri.<sup>29</sup> Beberapa nilai tersebut sebenarnya ada dalam diri masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara pancasila, namun

<sup>29</sup>Budi Dharma, *Korupsi Dan Budaya Dalam Kompas*. 25/10/2015



Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan antikorupsi di daerah / Bangkalan perlu memperhatikan beberapa hal,<sup>31</sup> antara lain :

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, pemuda perlu mendapatkan berbagai informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada pemuda. Disamping itu pemuda juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek moralitas akan memberikan pemuda wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi pemuda tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Kesemua ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Ibid, 23-24

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap pemuda, sikap merupakan disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut.

<sup>33</sup>Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Pada Masa Reformasi*, (Jurnal of Historical Studies X Juni 2009) 51

### 3. Perubahan Sikap

Pendidikan antikorupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itulah diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang dapat dipakai dari berbagai sumber. Misalnya untuk membentuk perepsi tentang korupsi yang berlawanan

dengan persepsi yang dimiliki pemuda dan dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi.

Strategi lain dalam merubah sikap ialah berdasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, sebab itulah diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artina proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang, sebab itulah jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu yang panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskripsikan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing pemuda untuk berfikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Sebab reaksi tersebut disebut dengan *postponement effect*<sup>35</sup>, dimana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.

#### 4. Perspektif Moral dan Konvensional

Pendidikan antikorupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial, yaitu moralitas dan konvensi, dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya dari perspektif moral suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya, apakah tindakan tersebut menyakitkan bagi

<sup>35</sup>Didantic, Anti Corruption,,,,,,,,,25

Konvensi merupakan norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada pada suatu masyarakat diwaktu tertentu, jadi tidak menjadi wajib bagi komunitas lain karena tidak universal. Dalam kehidupan nyata moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil pada orang lain. Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti menghormati orang yang telah mati dapat menjadi pelanggaran moral sebab menyakiti orang lain. Dengan kata lain moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga memiliki logika yang berbeda.<sup>37</sup>

Pendidikan antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi. Dari perspektif konvensional apapun boleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari perspektif moral suatu tindakan dilihat dari apakah hal tersebut ada dalam norma atau tidak. Perspektif moral lebih sensitif melihat kerusakan yang ditimbulkan atau seseorang, sedangkan perspektif konvensional lebih melihat pada pelanggaran kesepakatan, konsistensi dan ekspektasi dari pemilik otoritas. Pelanggaran

<sup>37</sup>Ibid, 54

Mengacu pada tujuan dan target pendidikan antikorupsi di atas, maka pembelajaran antikorupsi hendaklah didisain secara moderat dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran yang dialami oleh pemuda merupakan pembelajaran yang memberikan makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa dan negara, terutama dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Hanya dengan menempatkan kesadaran pada komunitas pemuda di Bangkalan, pembelajaran pendidikan antikorupsi merupakan sebuah langkah awal untuk membasmi korupsi di daerah masing-masing, mengingat peran kognisi dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Dengan pembentukan inilah mampu memperoleh melalui berbagai sumber yang terakumulasi dan disimpan dalam bentuk bagaimana ia diterima, namun pengetahuan yang kuat dan mendalam berasalh dari keaktifan individu dalam membangun makna dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan.

Sehubungandengan itu nilai-nilai tersebut haruslah merupakan esensi-

Nilai-nilai dapat dikatakan mendasari sesuatu barang dan bersifat tetap.

Selanjutnya jika nilai dikaitkan dengan istilah pendidikan, maka nilai

<sup>39</sup> Louis O. Kaffsoff, *Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat*, Terj. Soenarjo Soemargono, (1996. Yogyakarta : Tiara Wacana) 345.

Jadi pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat.

Korupsi sendiri menurut masyarakat tidak asing dengan istilah korupsi. Korupsi selalu identik dengan pemerintahan atau pejabat. Perlu diketahui meski banyak kejadian bahwa korupsi sering dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tetapi orang selain pihak tersebut juga dapat melakukan korupsi.

Dalam kamus ilmiah populer, korupsi diartikan kecurangan; penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan.<sup>42</sup> Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus atau politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

---

<sup>41</sup> Agus Wibowo, Pendidikan Antikorupsi,.... 38

<sup>42</sup>Pius A Partanto & M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,(2004, Surabaya: Penerbit Arkola.) 375.



Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan korupsi mula-mula adalah menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang publik yang telah dipercayakan pada dirinya, kemudian digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya semata, lama-kelamaan digunakan sebagai ajang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal seperti ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di masyarakat bahkan sudah menjadi budaya dikalangan pejabat publik.

Bracking memberikan definisi korupsi sebagai berikut:

“Korupsi dalam konteks *administrative corruption* atau *bureaucraticcorruption*, *petty corruption*, dan *graft*. Korupsi administrasi atau birokrasi adalah pembayaran haram yang diterima oleh pegawai negeri dari

<sup>44</sup>Ibid., . 18.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>45</sup>

1. Suap
2. Illegal profit;
3. Secret transaction;
4. Hadiah;
5. Hibah (pemberian);



1. Perbuatan melawan hukum yang berlaku dan merugikan negara.
2. Tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu
3. Penyupaan mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
4. Penggelapan, suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan. Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
5. Pemerasan, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.

- ## 1. Korupsi ekstortif

## 2. Korupsi manipulatif



Semua ajaran agama mengajarkan bahwa perbuatan korupsi dan suap menyuap merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori dosa. Tidak ada agama yang mentoleransi perbuatan korupsi, apalagi menganjurkan. Namun pada kenyataannya masalah agama dan penerapan agama hanya di tempat-tempat ibadah saja serta cenderung memisahkan antara kepentingan agama dengan kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

### c. Latar Belakang Sejarah (Kolonialisme)

Dalam konteks Indonesia, warisan kolonialisme dan masa penjajahan masa lalu memiliki sumbangan yang signifikan, walaupun pada dasarnya telah terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam menentukan kehendaknya sendiri. Kolonialisme telah menyebabkan bibit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Birokrasi yang diciptakan oleh kolonialisme adalah birokrasi yang mempertahankan budaya patrimonial dan feodalisme dalam bentuk baru. Birokrasi yang demikian ini menimbulkan birokrasi nepotisme yang memberi jabatan atau jasa khusus pada sanak saudara dan sahabat.

Dalam lingkungan yang demikian ini berbuat korupsi dianggap sesuatu yang wajar dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai perbuatan korupsi yang terjadi.

d. Kualitas Pendidikan yang rendah

Dengan adanya pendidikan yang berkualitas maka manusia Indonesia dididik menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, berwatak, bertanggungjawab, serta sadar akan hak dan kewajiban setiap warga Negara terhadap Negaranya. Namun adanya kualitas yang rendah maka tujuan pendidikan Indonesia menjadi terbalik sehingga hal ini akan mendorong munculnya praktik korupsi.



Faktor kemiskinan dan gaji yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Lebih tepatnya, terjadi kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin sebagai faktor pemicu terjadinya korupsi. Keadaan tersebut ditunjang lagi oleh tumbuh suburnya sikap masyarakat yang hedonism dan konsumeristik yang dipengaruhi oleh perilaku pejabat, iklan media, radio dan lain-lainnya.

Hukum berfungsi ganda, disatu sisi hukum difungsikan sebagai faktor pencegahan terjadinya korupsi. Pada sisi yang lain, hukum yang lemah dan penegakan hukum yang buruk dan aparat penegak hukum yang korup akan menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Apabila hukum lemah dan penegakan hukum yang buruk tidak dapat berfungsi sebagai alat pengendali kejahatan, malah justru sebaliknya dikendalikan oleh para pelaku kejahatan.

Keadaan kelompok penekan (*pressure group*) atau kontrol sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Kelompok penekan muncul karena tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat sipil bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang dan mengkorupsi uang Negara adalah perbuatan jahat terencana yang merugikan rakyat banyak. Sebaliknya, peran minimal dari kelompok ini dapat melegitimasi perilaku korupsi tumbuh subur dan semakin meluas.



- Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi, yaitu:

- <sup>50</sup>Syamsul Anwar , *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, (2006, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP), 13

Menurut Suyahmo akibat buruk atau negatif dari korupsi adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Perilaku korupsi mengindikasikan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan. Dengan adanya korupsi maka kegiatan pemerintah yang

<sup>52</sup>Suyahmo, Korupsi Dalam Perspektif Pancasila.dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum (2006, Semarang: Rumah Indonesia) 36.

telah diputuskan menjadi terbengkalai dan bahkan biasa gagal dikarenakan dana operasionalnya dikorupsi oleh pegawainya.

2. Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya administrasi. Dengan adanya praktik korupsi maka biaya pengeluaran untuk barang dan jasa menjadi lebih besar dari yang semestinya dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung tambahan biaya tersebut. Misalnya pembagian beras sembako yang aslinya diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat miskin, akibat adanya praktik korupsi maka rakyat diharuskan membeli beras tersebut. Meskipun dibanding dengan harga pasar lebih murah tetapi tindakan ini sudah termasuk akibat dari praktik korupsi.
3. Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk masyarakat umum. Dana yang seharusnya dipakai kalangan umum. Korupsi menandakan rusaknya moralitas suatu bangsa karena dengan praktik korupsi maka seseorang tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana perbuatan yang tercela.
4. Kalau golongan elit dianggap bersikap korupsi secara luas dan mendalam, maka rakyat kecil tidak akan menjumpai alasan ia pun tidak akan berusaha apa saja yang membawa keuntungan bagi dirinya. Indonesia masih menganut budaya paternalistik, dimana seorang pemimpin menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Jika seorang pemimpin melakukan korupsi maka bawahannya cenderung berbuat yang sama. Oleh karena itu para golongan elit dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan korupsi karena kemungkinan besar akan dicontoh oleh rakyat kecil.

5. Keengganan kaum politik untuk mengambil tindakan, yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak menyenangkan masyarakat, misalnya yang menyolok soal pajak. Masyarakat diwajibkan membayar pajak tetapi uang pajak itu sendiri tidak hanya untuk masyarakat semata tetapi untuk dana operasional seluruh negara.
6. Dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sikap para pejabat pemerintah, timbul keinginan akan hubungan khusus guna mengumpulkan “bobot” yang cukup untuk membayar tuntunan yang sama dari golongan lain.
7. Karena korupsi merupakan tindakan tidak adil yang telah dilembagakan terhadap orang dengan sendirinya timbul tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan bersifat fitnah serta rasa sakit hati yang mendalam.
8. Korupsi menyebabkan keputusan yang akan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Setiap pengambilan keputusan para ahli politik selalu memperhitungkan besarnya keuntungan yang didapat dan bukan mementingkan kepentingan rakyat.

Menurut Sudjana, korupsi yang dilakukan secara sistemik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dampak langsung dari perbuatan korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan jasa pelayanan publik yang buruk dan kurang memuaskan. Akibatnya pembangunan nasional akan terbengkalai karena dana operasionalnya dikorupsi oleh pejabat publik.

Dengan adanya korupsi maka masyarakat menjadi amoral karena tidak membedakan lagi mana perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik. Selain itu korupsi juga dapat menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang miskin. Hal ini akan menimbulkan ketidakpekaan rasa sosial dan memandang penderitaan orang lain sebagai hal yang biasa.

Tindakan korupsi dapat berakibat sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kegiatan usaha. Korupsi juga menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian artinya harga penjualan barang dan jasa menjadi naik karena biaya produksi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus terlebih dahulu melewati korupsi. Hal ini menimbulkan penderitaan bagi rakyat terutama rakyat miskin sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kriminalitas.

Diskursus mengenai kekuasaan menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Diskursus ini telah berlangsung sejak zaman Yunani kuno dan terus berlangsung sampai zaman ini. Para filsuf kuno seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles telah membahas tentang kekuasaan dan bagaimana seharusnya kekuasaan dijalankan.



Michel Foucault (1926-1984) salah seorang filsuf pelopor strukturalisme juga berbicara tentang kekuasaan. Konsep Kekuasaan Foucault dipengaruhi oleh Nietzsche. Foucault menilai bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.<sup>55</sup>

Adanya relasi akan lahir kekuatan yang akan melegitimasi kehendak. Seperti yang dikatakan Nietzsche bahwa naluri manusia mempunyai kehendak untuk berkuasa. Sebab itu Max Foucault melahirkan sebuah teori relasi kekuasaan. Teori itu menjadi jawaban bahwa kekuasaan selama ini yang terjadi merupakan kombinasi dari relasi dan kehendak berkuasa.

Foucault mengemukakan teorinya mengenai wacana sebagai pengetahuan yang terstruktur: aturan, praktik yang menghasilkan pernyataan

<sup>54</sup> A. Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Kaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 428.

<sup>55</sup> Steven Best & Douglas Kellner, *Teori Postmodern, Interogasi Kritis*, Indah Rohmani (Penterj.) (Malang: Boyan Publishing, 2003), 40.

Kekuasaan, menurut Foucault, bukan milik siapa pun, kekuasaan ada di mana-mana kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam.<sup>56</sup>

Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Karena Foucault menguatkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan yang menyediakan kekuasaan. Ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.

Menurut Michel Foucault, ketika sebuah wacana atau kebijakan dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusikan kembali menurut kemauan pembuatnya. Wacana atau kebijakan itu juga dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan

<sup>56</sup>Muji Sutrisno, dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*. (Yogyakarta:Kanisius), 2005, hal. 154.

(*episteme*) tertentu sehingga kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan.

Ia menempatkan kebenaran, rasio, pengetahuan, ilmu, diskursus akademik, pengobatan, pendidikan, rumah sakit, manusia dan sebagainya dalam rangka relasi dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah relasi-relasi yang bekerja dalam ruang dan waktu tertentu serta memproduksi kebenaran. Kebenaran memiliki mata rantai dengan sistem kekuasaan. Kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, akan tetapi berada dalam kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kebenaran.<sup>57</sup>

Foucault memahami ilmu pengetahuan sosial dapat menjadi alat penguasaan manusia atas manusia, artinya untuk mengendalikan dan memengaruhi putusan (tubuh dan jiwa) orang lain, sehingga terjadilah dwitunggal kekuasaan-pengetahuan. Tubuh dilihat sebagai “mesin hidup” (*man-the-machine*) sebagai sumberdaya dan tenaga kerja yang perlu dikendalikan dan dimanfaatkan guna kemajuan.

Posmodernisme Foucault menawarkan pandangan berharga tentang kontrol sosial. Para sosiolog sangat terbantu dalam melihat perilaku menyimpang dalam hal pengalaman dan makna yang mengkonstruksinya. Pandangan Foucault sangat sesuai dengan abad informasi dewasa ini yang menganggap bahwa pengetahuan dan kekuasaan mempunyai dasar yang

Sederhananya kekuasaan menciptakan pengetahuan, pengetahuan melahirkan kekuatan, kekuatan melahirkan relasi, relasi melahirkan kekuasaan, serta kekuasaan saling memengaruhi secara langsung satu sama lain. Dengan demikian, ideologi yang diterapkan penguasa merupakan peta-peta makna yang meski berpotensi mengandung kebenaran universal, sebenarnya merupakan pemahaman historis yang mengelabui dan melanggengkan kekuasaan.

Ilustrasinya, di setiap ada kekuasaan maka dengan landasan legitimasi powernya akan menelurkan banyak hal yang dengan mudah bisa menguntungkan pribadi maupun kelompok penguasa, disamping meski pada kenyataannya dikhususkan untuk hajat orang banyak. Adanya teori relasi kekuasaan dari M Foucault ini menjadi suatu titik terang bagaimana kekuasaan itu bekerja dan kekuasaan itu berbuat, sehingga perlu adanya kontrol sosial agar kekuasaan tidak terdistorsi dengan perilaku-perilaku menyimpang.

Perilaku adalah aktivitas fisik manusia yang bisa diamati. Munculnya perilaku berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu atau setidaknya mengembangkan kecenderungan untuk berperilaku tertentu. Motivasi dapat



1) pribadi: Mereka yang membutuhkan kekuatan pribadi ingin mengarahkan orang lain

### E. Gerakan (GP) Ansor Dan Program-Programnya

<sup>62</sup> Ibid

Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi "konflik" internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. KH Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.

Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab, "ulama besa" sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).





Pada awalnya berdiri IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul ‘Ulama’) pada bulan Desember 1955 di Jakarta yang dipelopori wakil Haris Sugianto. Sedangkan di Surakarta beberapa mahasiswa NU yang dimotori Mustahal Ahmad mendirikan keluarga mahasiswa Nahdlatul ‘Ulama’ (KMNU). Akan tetapi, keberadaan IMANU dan KMNU ini ditentang keras oleh pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul ‘Ulama’

Gagasan untuk membuat wadah sebagai penyaluran aspirasi bagi mahasiswa NU pada Mu'tamar ke – 2 IPNU di Pekalongan 1-5 Januari 1957 kembali menjadi perbincangan hangat. Namun gagasan tersebut kembali ditentang karena organisasi itu hanya akan menjadi pesaing IPNU. Dan pada Mu'tamar NU ke-3 di Cirebon tgl 27-31 desember 1958 dibentuklah departemen Perguruan tinggi sebagai upaya kompromistis atas ditolaknya pendirian organisasi mahasiswa NU. Sebagai ketua pertama badan otonomi IPNU ini adalah Ismail Makky mahasiswa senior fakultas Syari'ah PTAIN Yogyakarta. Namun dalam perjalanannya, antar IPNU dan departemen perguruan tingginya sering terdapat ketimpangan dalam melaksanakan program organisasi. Ketimpangan tersebut terjadi karena adanya cara pandang yang diterapkan para mahasiswa dengan pelajar yang menjadi pimpinan organisasi serta tidak bebasnya para mahasiswa untuk melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PPIPNU. Sehingga usulan legalisasi atau pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali.

Melalui musyawarah mahasiswa NU tersebut, yang di  
pada tanggal 14-16 april 1960 disekolah muaamalat NU W  
Surabaya. Yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa NU da  
Yogyakarta, Surakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, M  
sejumlah perwakilan senat mahasiswa dari perguruan tinggi yang  
dibawah NU. Dalam musyawarah tersebut terjadi sebuah perdebatan

Selain itu, musyawarah juga menghasilkan rumusan peraturan dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serta memilih sahabat mahbub junaedi sebagai ketua umum, A. Kholid mawargi sebagai wakil ketua dan Said Budairi sebagai sekretaris umum. Serta ketiga orang tersebut diberi wewenang untuk menyusun kelengkapan pengurus pusat PMII sedangkan pendeklarasian secara resmi PMII tanda 17 april 1960 / 17 syawal 1379.

Awal kata “P” dengan kepanjangan porgerakan adalah sebagai satu bentuk penegasan bahwa PMII sebagai organisasi yang tidak hanya grubyak grubyuk atau sebagai tempat berhimpun, berkumpul yang terbesar stagiman tapi sebagai organisasi yang progresif dan selalu dinamis.

Sedangkan kata dengan "Indonesia" mempunyai makna bangsa dengan satu pemahaman negara kesatuan republik indonesia yang pluralistik. Maka komitmen berislam bagi PMII sebagai organisasi siswa yang progresif adalah sebuah keniscayaan untuk menebar nilai – nilai universal islam bagi terwujudnya tataran seluruh alam. Dalam petanya dengan Indonesia PMII akan mengembangkan potensi-potensi, nilai-nilai islami yang sudah ada tanpa harus melakukan islamisasi atau mengaraban Indonesia bahkan menjadi missionaris fundamentalisme yang ekstreem. Karena PMII mencita-citakan sebuah tata kebangsaan, yang berbudi

- a) Program Kerja PC PMII kab Bangkalan Masa Khidmat 2017-2018

1.Menyelenggarakan PKL tingkat regional/nasional

- 2.Menyelenggarakan Lokakarya Pengkaderan tingkat PC PMII  
Kab.Bangkalan

### 3.Musyawarah Pimpinan Cabang

BIDANG JARINGAN & INFORMASI

- 1.Mengembangkan&memperkuat jaringan (OKP, Ormas, LSM dan BEM)
- 2.Menyelenggarakan Dialog lintas organ
- 3.Mengadakan kerjasama dengan ormas lainnya
- 4.Mengadakan audiensi dengan instansi
5. Menggalang donatur tetap
6. Mengadakan polling isu-isu kontemporer di Kab. Bangkalan
7. Mengadakan jaringan internet (blog/web site PC PMII Kab.Bangkalan)

BIDANG KAJIAN

1. Membentuk forum konsentrasi kajian
2. Menyelenggarakan kajian rutin internal PC PMII Kab.Bangkalan
3. Menyelenggarakan Diskusi Terbuka Lintas organ kemahasiswaan, OKP, dan Ormas (Dialektika Nusantara)
4. Bedah buku rutin
5. Sekolah Analisa Sosial



3. Menyelenggarakan Sanlat Pelajar se-Kab.bangkalanplus Kampanye Sosial Anti Narkoba Dan Pendidikan Anti Korupsi

- #### 4. Mengadakan Kemah Bakti Mahasiswa

5. Menyelenggarakan Workshop Dakwah Multikultural bekerjasama dengan instansi terkait

Lembaga Advokasi, Hukum dan HAM

1. Diklat Advokasi dan HAM se-Jabar
2. Advokasi terhadap kelompok masyarakat marginal (kasus hukum dan HAM)
3. Studi dan advokasi produk hukum

Lembaga Penerbitan, Pers dan Jurnalistik (LP2J)

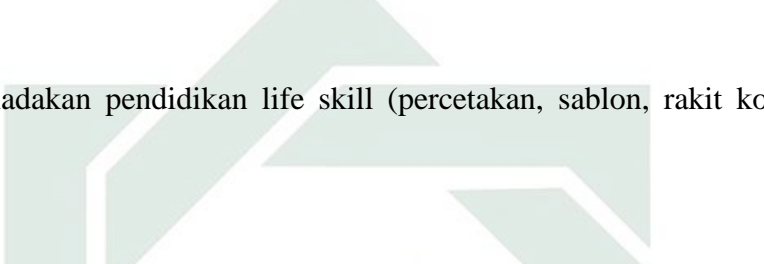
1. Penerbitan majalah dwi bulanan
2. pelatihan jurnalistik
3. Penerbitan buletin mingguan
4. Penerbitan jurnal ilmiah
5. Road show ke media
6. Talkshow dan diskusi interaktif di radio dan TV lokal



## 7. Penerbitan buku

## 8. Langganan koran dan klipingisasi

## Lembaga Pengembangan Ekonomi

- 
1. Pelatihan kewirausahaan
  2. Menadakan pendidikan life skill (percetakan, sablon, rakit komputer, dsb)
  3. Pembentukan badana usaha (kopersi, toko buku, rental komputer, dll)

## Lembaga Seni dan Budaya

1. Gelar Seni dan Budaya Rakyat
2. Mimbar Ekspresi seni Kader (per bulan

E. Gelora mahasiswa penyelamat rakyat

Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR) merupakan organisasi aadhoc yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa bangkalan dan Surabaya setelah Fuad Amin imron(mantan bupati bangkalan dua periode 2003-2014 dan ketua DPRD kab bangkalan periode 2014-2019) di tangkap OTT 2016 oleh KPK, saat itu banyak loyalis fuad yang selalu melakukan demonstari agar fuad amin dibebaskan, sebab mereka menganggap fuad adalah kiya dan tokoh, akhirnya agar stigma negative terhadap masyarakat bangkalan yang fanatic buta, mahasiswa dari beberapa kampus

mendeklarasikan GEMPAR untuk mengingatkan dan membuka fikiran para loyalis fuad, agar mereka sadar bahwa koruptor bukanlah panutan yang harus dibela<sup>63</sup>

Gempar mempunyai struktur pada kordinator di setiap kampus saja, adapun struktur kordinatonya sebagai berikut

1. Kordinator kampus UTM : Bahiruddin
2. Kordinator kampus UINSA surabaya : Nurhakim
3. Kordinator kampus STKIP bangkalan : muhlis ali wafa
4. Kordinator STITAL bangakaln : Subaidi Abdillah
5. Kordinator kampus STITMU bangkalan : M syahril
6. Kordinator kampus STAMIDIYA bangkalan: Zubair

Adapun program program GEMPAR sebagai berikut :

1. Melakukan mimbar demokrasi. Dalam upaya kritik social dan menghancurkan doktrinisasi kebenaran absolute para loyalis fuad amin
2. Melakukan demonstari terhadap DPRD agar memakzulkan atau mencopot Makmun Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merupakan putra fuad amin dan menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga melakukan praktek korupsi dengan sang ayah <sup>64</sup>

<sup>63</sup> Wawancara dengan syahril, muhlis ali wafa dan zubair di kabupaten bangkalan pada tanggal 27 oktober 2017

<sup>64</sup> Wawancara dengan bahirudin pada tanggal 28 oktober 2017

3. Melakukan diskusi public tentang pemotongan generasi koruptif dengan pihak APH, baik polisi maupun kejaksaan,

1. Madura corruption watch (MCW)

MCW adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan Pemuda yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dalam upaya memutus mata rantai kejahatan latin korupsi dan mempunya Misi

“memberdayakan rakyat dalam Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan kepada Pancasila. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan pemerintah”

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bersifat lokalistic. Dalam artian tidak mempunyai struktur sampai ke provinsi maupun ke pusat. Struktrur MCW sebagai berikut :

1. Direktur : Syukur sabidin
2. Wakil direktur : M sholeh
3. Sekretaris : maratus solehah
4. Bendahara : Muhammad yusuf
5. Kordinator ajudikasi : abdrur rahman SH
6. Kordinator litbang : syaifullah
7. Kordinator surveyor : Muhammad yusuf

1. Melakukan investigasi program pemerintah yang berupa fisik, seperti halnya pembangunan gedung dari dana anggaran kabupaten, maka MCW selalu memantau dan turun ke lokasi dan hal investigasi dan pembacaan, terkait temuan di lapangan
2. Melakukan siding sengketa permohonan informasi public terhadap komisi informasi, tentang kebijakan kebijakan public yang tidak sesuai dengan norma, hokum,maupun juklak dan juknisnya program tersebut, contoh meminta RAB,SPJ dan bentuk eksekusi dari realisasi program pemerintah<sup>65</sup>.

CIDE merupakan organisasi local di kabupaten bangkalan, yang mempunyai orientasi kajian-kajian keislaman dan demokrasi. Semua kegiatan organisasi ini bertumpuk pada pemupukan terhadap generasi pemuda agar faham betul tentang konsep demokrasi dan keislaman, Namun bukan berarti CIDE hanya stagnan dalam kegiatan tersebut, CIDE juga bergerak sebagai organisasi gerakan intelektual organik, terutama dalam permasalahan korupsi. Cide aktif dalam pengawalan program pemerintah, baik perencanaan ABPD, penetapan APBD sampai pada tahap implelementasi dari program-program ABPD<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Wawancara dengan ketua cide. M shoim pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bagkalan

Dalam hal pembentukan moral anti korupsi cide juga sangat aktif, mereka mengkampanyekan tentang bahaya korupsi terhdap para pemuda di kabupaten bangkalan. Mereka memanfaatkan setiap hari minggu di stadion bangkalan. Setiap hari minggu stadion bangkalan selalu dipadati oleh masyarakat bangkalan terutama kaum muda. Sehingga mereka memberikan game tentang apa itu korupsi dan bahaya korupsi <sup>67</sup>

Adapun struktur CIDE kabupaten bangkalan sebagai berikut:

Pembina : Mathur husyairi

Pelindung : fauzan ja'far

Dewan pertimbangan : Hosun

1. Ketua : M soim

2. Wakil ketua : Nur hakim

3. Sekretaris : M ruji

4. Bendahara : umar jagat ali ulhaq

5. Devisi intelektual : toyyib

6. Devisi litbang : Eko wahyudi

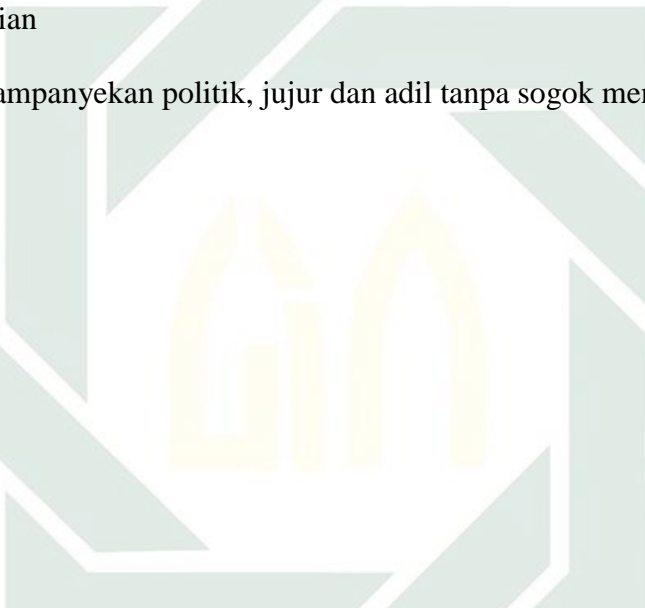
7. Devisi advokasi : rofi'I

8. Devisi humas : mahsus ahmad

Adapun program-program cide tentang pendidikan anti korupsi sebagai berikut<sup>68</sup> ;

<sup>67</sup> Wawancara dengan sekretaris cide m ruji pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bangkalan

<sup>68</sup> Ibid.

- 
3. Melaporkan dan mengawal tindak pidana korupsi ke pihak kejaksaan kepolisian
4. mengkampanyekan politik, jujur dan adil tanpa sogok menyogok

## A. GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BANGKALAN

Adapun strukturnya gp ansor di kabupaten bangkalan sebagai berikut

Ketua	: H. HASANI ZUBAIR, S.IP., M.KP
Wakil Ketua I	: H. FAHAD MUHAMMAD
Wakil Ketua II	: H. MUZAWWIR, M.Th.I
Wakil Ketua III	: H. MOH. AYYUB MUSTOFA, MA
Wakil Ketua IV	: H. MAKINUN AMIN
Wakil Ketua V	: ABD. MUNIB, M.Pd.I
Wakil Ketua VI	: SUPANDI AZZAURI
Wakil Ketua VII	: ASIS, S.IP
Wakil Ketua VIII	: H. MOH. HOLIFI, M.Pd.I
Sekretaris	: ALI MUSTOFA, M.Pd.I
Wakil Sekretaris I	: RIFOY ALI FAHMI, S.Pd.I

## 1. Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. MASHUDI, SH, MH
- b. ROHIM, SH, MH
- c. MUHLIS, SH, MH
- d. HAJATULLOH, SH, MH

2. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi
- a. SANUSI, S.Pd.I
  - b. A. MUTAMTAM
  - c. EFENDI



d. AHMAD BBUSTANURRIDO, SE

e. H. ABD. ROHIM, SE

### 3. Departemen Pemberdayaan Ekonomi

a. HAMIMUDDIN

b. HUSNI SYAKUR

c. ZAINUN NASIHIN

#### d. MANAB

#### 4. Departemen Informasi, Iptek dan Kajian Strategi

a. ZAIRIL MUNIR

b. SALMAN AL-FARISI, S.Kom

c. ABD. RAHMAN, ST

d. SURYADI, S.Pd.I

e. NUR HADI MUHNI

## 5. Departemen Lingkungan Hidup

### a. RAFLI

b. NIZAR

c. JAMHARI

#### d. NASIHUL ABROR

e. MAHSUS, S.Pd.I

## 6. Departemen Olahraga dan Kebudayaan

a. M. ARIF ISMAIL

b. TOLIP, S.Pd.I

- c. KHOLID, M.HI

- d. SELI, S.S

- e. H. MAHRUS

## 7. Departemen Agama dan Ideologi

- a. H. IMAM MUSLIM

- b. H. MUDI

- c. H. M. SOLEH

- d. MUDABBIR MASHUDI

- e. H. ABD. AZIZ

### III. SEMI OTONOM

## 1. Satkocab Banser

Kepala : ABD. QODIR

Anggota:

- a. ISMAIL

- b. H. ABD. KARIM

- c. YA'QUB

- d. ABD. HAMID

#### IV. DEWAN PENASEHAT

Ketua : KH. MAKKI NASIR

Wakil Ketua : KH. HASBULLAH MUHTAROM

Sekretaris : KH. DIMYATI MUHAMMAD





**MASA KHIDMAT 2016/2017 M.**

KH. Syafi' Rofi'i

Mufti Shohib

<b>Ketua Umum</b>	: Bahiruddin
Ketua I	: Muhammad Saifur Rahman
Ketua II	: Syahril Abdillah
Ketua III	: Ahmad Affif
<b>Sekretaris Umum</b>	: Subaidi
Sekretaris I	: Hobir
Sekretaris II	: Fuad Fahmi
Sekretaris III	: Zainal Abidin
<b>Bendahara</b>	: Haris
Wakil Bendahara	: Siti Romlah

**Biro – Biro**

**BIDANG INTERNAL**

- a. Biro Kaderisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Anggota

Koordinator : Hardiyanto Laksamana

Anggota :

1. Suryadi Arfa
2. Hafid

- b. Biro Pendayagunaan Potensi Dan Kelembagaan Organisasi

Koordinator : Ahmad Mansur

Anggota :

1. Hamimah
2. Moh. Munir

- c. Biro Pemberdayaan Ekonomi Dan Kelompok Profesional

Koordinator : Abd. Kohir

Anggota :

1. Nur Hasan
2. Mahmudi

## BIDANG EKSTERNAL

- a. Biro Hubungan Dan Komunikasi Pemerintah Dan Kebijakan Public

Koordinator : Syakroni

Anggota :

1. Rizal
2. Aziz

- b. Biro Hubungan Dan Komunikasi Organ Gerakan, Kepemudaan Dan Perguruan Tinggi

Koordinator : Sofyan Ali

Anggota :

1. Sallam
2. Ilham Rofiki

- c. Biro Pengembangan Media Dan Informasi

Koordinator : Ahmad Sayadi



1. mengadakan diskusi dengan mahasiswa lintas perguruan tinggi di kabupaten bangkalan, tentang bahaya korupsi dan mengatasinya setiap pada momentum diskusi diskusi non formal di PMII

3. melakukan demonstrasi dalam rangka perlawanan terhadap para koruptor di kabupaten bangkalan.<sup>70</sup>

Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR) merupakan organisasi aadhoc yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa bangkalan dan Surabaya setelah Fuad Amin imron(mantan bupati bangkalan dua periode 2003-2014 dan ketua DPRD kab bangkalan periode 2014-2019) di tangkap OTT 2016 oleh KPK, saat itu banyak loyalis fuad yang selalu melakukan demonstari agar fuad amin dibebaskan, sebab mereka menganggap fuad adalah kiya dan tokoh, akhirnya agar stigma negative terhadap masyarakat bangkalan yang fanatic buta, mahasiswa dari beberapa kampus mendeklarasikan GEMPAR untuk mengingatkan dan membuka fikiran para loyalis fuad, agar mereka sadar bahwa koruptor bukanlah panutan yang harus dibela<sup>71</sup>

Gempar mempunyai struktur pada kordinator di setiap kampus saja, adapun struktur kordinatonya sebagai berikut

<sup>71</sup> Wawancara dengan syahril, muhlis ali wafa dan zubair di kabupaten bangkalan pada tanggal 27 oktober 2017



- in program GEMPAR sebagai berikut :
- an mimbar demokrasi. Dalam upaya krit  
ancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loy  
kan demonstari terhadap DPRD agar memakzulk  
n Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merup  
an menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga me  
dengan sang ayah<sup>72</sup>
- kan diskusi public tentang pemotongan generasi  
APH, baik polisi maupun kejaksaan,

an program GEMPAR sebagai berikut :

an mimbar demokrasi. Dalam upaya kritis  
ancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyal  
kan demonstrasi terhadap DPRD agar memakzulkan  
an Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merup  
an menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga me  
dengan sang ayah<sup>72</sup>

kan diskusi public tentang pemotongan generasi  
APH, baik polisi maupun kejaksaan,

- an program GEMPAR sebagai berikut :
- an mimbar demokrasi. Dalam upaya kritis  
ancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyal  
kan demonstrasi terhadap DPRD agar memakzulkan  
an Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merup  
an menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga me  
dengan sang ayah<sup>72</sup>
- kan diskusi public tentang pemotongan generasi  
APH, baik polisi maupun kejaksaan,

an program GEMPAR sebagai berikut :

an mimbar demokrasi. Dalam upaya kritis  
ancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyal  
kan demonstrasi terhadap DPRD agar memakzulkan  
an Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merup  
an menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga me  
dengan sang ayah<sup>72</sup>

kan diskusi public tentang pemotongan generasi  
APH, baik polisi maupun kejaksaan,

an program GEMPAR sebagai berikut :

an mimbar demokrasi. Dalam upaya kritis  
ancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyal  
kan demonstrasi terhadap DPRD agar memakzulkan  
an Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merup  
an menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga me  
dengan sang ayah<sup>72</sup>

kan diskusi public tentang pemotongan generasi  
APH, baik polisi maupun kejaksaan,

an program GEMPAR sebagai berikut :

an mimbar demokrasi. Dalam upaya kritis  
ancrukan doktrinisasi kebenaran absolute para loyal  
kan demonstrasi terhadap DPRD agar memakzulkan  
an Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merup  
an menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga me  
dengan sang ayah<sup>72</sup>

kan diskusi public tentang pemotongan generasi  
APH, baik polisi maupun kejaksaan,



CIDE merupakan organisasi local di kabupaten bangkalan, yang mempunyai orientasi kajian-kajian keislaman dan demokrasi. Semua kegiatan organisasi ini bertumpuk pada pemupukan terhadap generasi pemuda agar faham betul tentang konsep demokrasi dan keislaman, Namun bukan berarti CIDE hanya stagnan dalam kegiatan tersebut, CIDE juga bergerak sebagai organisasi gerakan intelektual organic, terutama dalam permasalahan korupsi. Cide aktif dalam pengawalan program pemerintah, baik perencanaan APBD, penetapan APBD sampai pada tahap implemementasi dari program-program ABDP<sup>74</sup>

Dalam hal pembentukan moral anti korupsi cide juga sangat aktif, mereka mengkampanyekan tentang bahaya korupsi terhdap para pemuda di kabupaten bangkalan. Mereka memanfaatkan setiap hari minggu di stadion bangkalan. Setiap hari minggu stadion bangkalan selalu dipadati oleh masyarakat bangkalan terutama kaum muda. Sehingga mereka memberikan game tentang apa itu korupsi dan bahaya korupsi <sup>75</sup>

Adapun struktur CIDE kabupaten bangkalan sebagai berikut:

Pembina : Mathur husyairi

<sup>75</sup> Wawancara dengan sekretaris cide m ruji pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bangkalan



# ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KOMUNITAS PEMUDA DI KABUPATEN BANGKALAN

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura; berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat<sup>77</sup>.

Sejak diresmikannya Jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya (Bukit Jaddih, Gunung Geger, Pemandian Sumber Bening -Langkap - Modung dsb); budaya (Karapan sapi, dsb), serta wisata kuliner di antaranya adalah nasi bebek khas Madura.

88



Berdasarkan peta tanah tinjau, secara umum jenis tanah di Kabupaten Bangkalan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu tanah Zonal dan tanah Azonal. Kelompok tanah Zonal meliputi jenis alluvial, regosol dan litosol. Sedangkan Kelompok tanah Azonal meliputi jenis-jenis tanah yang sudah mengalami perkembangan secara lebih sempurna yaitu grumusol, mediteran dan lain sebagainya. Kemampuan tanah adalah sifat fisik tanah yang dibatasi oleh beberapa faktor yaitu kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, erosi, drainase, faktor-faktor pembatas tanah seperti tanah tertutup dan batu-batuan.

Luas tanah yang terkena erosi di Kabupaten Bangkalan seluas 37.232 Ha<sup>79</sup> (sekitar 29,81 %) dari luas wilayah Kabupaten Bangkalan. Di Kecamatan Kamal tidak dijumpai adanya erosi, sedangkan kecamatan yang telah terkena erosi lebih dari 50 % adalah Kecamatan Geger, Sepulu dan Galis. Namun, drainase tergenang periodik dan tergenang terus menerus tersebar sporadis di daerah pesisir, sedangkan seluruh wilayah kecamatan Burneh, Geger, Kokop, Tragah, Tanah Merah, Labang, Konang dan Galis drainasinya tidak pernah tergenang disebabkan karena fisiografinya berbukit-bukit.







sebelumnya,” terang Kapolres Bangkalan, AKBP Anisullah M Ridha, Jumat (22/7/2016).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Riono Budi Santoso berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di bumi Bangkalan. Hanya saja, dia mengaku sedang memprioritaskan pada kasus-kasus korupsi yang memiliki nilai besar.

“Saat ini kami sedang memprioritaskan pada (kasus) yang memiliki nilai besar. Karena dampaknya lebih luas dan pengambilan (kerugian negara) lebih menguntungkan bagi masyarakat. Kasus-kasus lain juga terus kami perhatikan,” terang Kajari di hadapan puluhan aktivis PMII Bangkalan yang sedang unjuk rasa di kantor Kejari, Kamis, 14/11/2016.

Menurutnya, saat ini Kejari Bangkalan tengah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus jalan kembar dan Taman Wisata Paseban. Pemeriksaan ini, sengaja dilakukan dalam waktu berbeda. Dalam pernyataan di depan aktivis muda NU Bangkalan ini, Riono juga membantah rumor yang menuding dirinya berperan dalam mutasi stafnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Nurul Hisyam.

Semua pemberitaan media local Bangkalan telah menyebarkan semua kasus korupsi yang ada di kabupaten Bangkalan. Dengan begitu, setiap lapisan masyarakat mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas telah mengetahui ketidaksehatan birokrasi yang ada.



Dalam persidangan, Fuad mengakui memiliki 21 mobil yang diatasnamakan orang lain. Alasannya untuk menghindari pajak progresif. Ia juga mengaku memiliki banyak apartemen atas nama keluarganya karena takut mati mendadak. "Apartemen atas nama Abdur Rouf, anak, dan istri. Saya sudah tua. Sehingga semua saudara ipar diberi apartmen satu-satu, khawatir jika meninggal mendadak," kata Fuad.<sup>84</sup>

Fuad juga mengakui banyak membeli tanah selama menjabat hingga 91 lokasi. Salah satunya di Cawang, Jakarta Timur, yang ia beli seharga Rp 49 miliar. Untuk membangun makam ayahnya, Fuad menggelontorkan uang Rp 36 miliar yang diambil dari APBD Bangkalan.

"Sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 35 UU Nomor 15 Tahun 2002 *juncto* UU 25 Tahun 2003 menyatakan bahwa Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, sesuai dengan fakta hukum. Namun ternyata dalam perkara *a quo*, di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan menurut hukum bahwa harta kekayaannya yang telah disita oleh Penyidik KPK dan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* bukan merupakan hasil tindak pidana, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf a, Pasal 194 ayat 1, dan Pasal 197 ayat 1 huruf i



Wakil Ketua II	: H. MUZAWWIR, M.Th.I
Wakil Ketua III	: H. MOH. AYYUB MUSTOFA, MA
Wakil Ketua IV	: H. MAKINUN AMIN
Wakil Ketua V	: ABD. MUNIB, M.Pd.I
Wakil Ketua VI	: SUPANDI AZZAURI
Wakil Ketua VII	: ASIS, S.IP
Wakil Ketua VIII	: H. MOH. HOLIFI, M.Pd.I
Sekretaris	: ALI MUSTOFA, M.Pd.I
Wakil Sekretaris I	: RIFQY ALI FAHMI, S.Pd.I
Wakil Sekretaris II	: SAMSUL ARIFIN, SE
Wakil Sekretaris III	: YUNUS MANSUR YASIN, S.Pd
Wakil Sekretaris IV	: BADRUN, S.Sos
Wakil Sekretaris V	: MUJIBUL KHOIRI, S.Sos
Wakil Sekretaris VI	: SYAFI'I, S.Pd.I
Wakil Sekretaris VII	: ACH. ZAINAL ABIDIN
Wakil Sekretaris VIII	: AHMAD SYAKIR, S.Pd
Bendahara	: MAHFUDZ ARIFIN, S.Ag
Wakil Bendahara	: M. WAHYU, ST
Wakil Bendahara	: RAHMAD, SE
Wakil Bendahara	: MOCH. MAHRUS ALY

a. ZAIRIL MUNIR



d. MUDABBIR MASHUDI

e. H. ABD. AZIZ

### III. SEMI OTONOM

## 1. Satkocab Banser

Kepala : ABD. QODIR

Anggota:

a. ISMAIL

b. H. ABD. KARIM

c. YA'QUB

d. ABD. HAMID

#### IV. DEWAN PENASEHAT

Ketua : KH. MAKKI NASIR

Wakil Ketua : KH. HASBULLAH MUHTAROM

Sekretaris : KH. DIMYATI MUHAMMAD

Wakil Sekretaris : KH. HASYIM ZUBAIR

Anggota :

a. KH. LATIF AMIN

b. KH. AKROM NAWAWI

c. KH. HUMRON MAULA

d. HOSUN, S.Pd



- e. ALIMAN, S.Pd.I
- f. FAUZAN JA'FAR, M.Si
- g. SAFIUDDIN ASMURO, SH

adapun kegiatan pendidikan anti korupsi GP Ansor Kabupaten Bangkalan sebagai berikut, KH hasani zubair (28) menuturkan, untuk sumbangsih terhadap negara dalam mengentaskan pedidikan saya dengan pengurus GP ansor safari terhadap sekolah-sekolah SMA/MA/-MTS/SMP setiap bulan 1 kali mengkampanyekan bahaya korupsi dan perilaku korupsi dan memupuk kejujuran pada setiap siswa di sekolah- sekolah, baik itu tingkat SMP/Mts SMA/MA<sup>86</sup>.

4. Pergerakan mahasiswa islam Indonesia kabupaten bangkalan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneisa adalah organisasi kemahasiswaan, PMII mempunyai struktur dari tingkat pusat yang disebut Pengurus Besar (PB) yang ada di Jakarta, mempunyai pengurus kordinator cabang di setiap provinsi se Indonesia, mempunyai pengurus cabang di setiap kabupaten se Indoneisa,

Adapun strukturnya PMII di kabupaten bangkalan sebagai berikut

<sup>86</sup> Wawancara dengan ketua gp ansor kabupaten bangkalan tanggal 22 oktober 2017

**MASA KHIDMAT 2016/2017 M.**

KH. Syafi' Rofi'i

**Anggota :**

Mufti Shohib



- Anggota :
1. Bahri Abdullah
  2. Abd. Rosyid

**BIDANG KEAGAMAAN**

- a. Biro Dakwah dan Kajian Islam
  - Koordinator : Abdul Gofur
  - Anggota :
    1. Aris Gunawan
    2. Fadli
- b. Biro Komunikasi dan Hubungan Pesantren
  - Koordinator : Abd. Karim MM
  - Anggota :
    1. Amalina Syafatul U
    2. Nur Alam MS

## BADAN SEMI OTONOM

**Korp PMII Putri**

- Ketua** : Anisatul Khoiriyah  
**Sekretaris** : Nailussa'adah Aviva  
**Bendahara** : Fakhriyatun Nisak

**Biro-biro**

- a. Biro Kaderisasi Dan Pengembangan Sumber Daya Anggota**
- Koordinator : Erica Agustina
- Anggota :
1. Anisa
  2. Luluk Muflihah
- b. Biro Wacana dan Pengembangan Intelektual**
- Koordinator : Nurotul Hidayah
- Anggota :
1. Imamiah
  2. Rohiyah
- c. Biro Jaringan Komunikasi, Lembaga Advokasi, Media dan Jurnalistik**
- Koordinator : Masfufatun Nikmah
- Anggota :
1. Rini Pujiarti
  2. Mustafiyah

1. mengadakan diskusi dengan mahasiswa lintas perguruan tinggi di kabupaten bangkalan, tentang bahaya korupsi dan mengatasinya setiap pada momentum diskusi diskusi non formal di PMII

3. melakukan demonstrasi dalam rangka perlawanan terhadap para koruptor di kabupaten bangkalan<sup>87</sup>

Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (GEMPAR) merupakan organisasi aadhoc yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa bangkalan dan Surabaya setelah Fuad Amin imron(mantan bupati bangkalan dua periode 2003-2014 dan ketua DPRD kab bangkalan periode 2014-2019) di tangkap OTT 2016 oleh KPK, saat itu banyak loyalis fuad yang selalu melakukan demonstari agar fuad amin dibebaskan, sebab mereka menganggap fuad adalah kiya dan tokoh, akhirnya agar stigma negative terhadap masyarakat bangkalan yang fanatic buta, mahasiswa dari beberapa kampus mendeklarasikan GEMPAR untuk mengingatkan dan membuka fikiran para loyalis fuad, agar mereka sadar bahwa koruptor bukanlah panutan yang harus dibela<sup>88</sup>

Gempar mempunyai struktur pada kordinator di setiap kampus saja, adapun struktur kordinatonya sebagai berikut

13. Kordinator kampus UTM : Bahiruddin

<sup>88</sup> Wawancara dengan syahril, muhlis ali wafa dan zubair di kabupaten bangkalan pada tanggal 27 oktober 2017

7. Melakukan mimbar demokrasi. Dalam upaya kritik social dan menghancurkan doktrinisasi kebenaran absolute para loyalis fuad amin
8. Melakukan demonstrasi terhadap DPRD agar memakzulkan atau mencopot Makmun Ibu fuad selaku Bupati 2013-2018 sebab merupakan putra fuad amin dan menurut GEMPAR Makmun ibnu fuad juga melakukan praktek korupsi dengan sang ayah <sup>89</sup>
9. Melakukan diskusi public tentang pemotongan generasi koruptif dengan pihak APH, baik polisi maupun kejaksaan,

MCW adalah lembaga yang terdiri dari sekumpulan Pemuda yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dalam upaya memutus mata rantai kejahatan latin korupsi dan mempunya Misi



CIDE merupakan organisasi local di kabupaten bangkalan, yang mempunyai orientasi kajian-kajian keislaman dan demokrasi. Semua kegiatan organisasi ini bertumpuk pada pemupukan terhadap generasi pemuda agar faham betul tentang konsep demokrasi dan keislaman, Namun bukan berarti CIDE hanya stagnan dalam kegiatan tersebut, CIDE juga bergerak sebagai organisasi gerakan intelektual organik, terutama dalam permasalahan korupsi. Cide aktif dalam pengawalan program pemerintah, baik perencanaan ABPD, penetapan APBD sampai pada tahap implelementasi dari program-program ABDP<sup>91</sup>

Dalam hal pembentukan moral anti korupsi cide juga sangat aktif, mereka mengkampanyekan tentang bahaya korupsi terhdap para pemuda di kabupaten bangkalan. Mereka memanfaatkan setiap hari minggu di stadion bangkalan. Setiap hari minggu stadion bangkalan selalu dipadati oleh masyarakat bangkalan terutama kaum muda. Sehingga mereka memberikan game tentang apa itu korupsi dan bahaya korupsi<sup>92</sup>

Pembina : Mathur husyairi

<sup>92</sup> Wawancara dengan sekretaris cide m ruji pada tanggal 23 oktober 2017 di kabupaten bangkalan





PBB selalu memonitoring setiap kegiatan politik dalam hal (money politik. Gratifikasi dll yang bersifat sogok menyogok)

Adapun struktur PBB sebagai berikut :

- Adapun kegiatan pendidikan anti korupsi PBB sebagai berikut :

- <sup>94</sup> Wawancara dengan ketua PBB mahmudi ibnu hotib di kabupaten bangkalan ada tanggal 28 oktober 2017 di kabupaten bangkalan

Teori Micehal Foucault (relasi kekuasaan) memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa kekuasaan sangatlah berpotensi untuk melakukan penyelewangan, dalam konteks korupsi kekuasaan merupakan actor absolute yang memberikan peluang melakukan tindak pidana korupsi, sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalau itu tidak “menguntungkan” pribadi, kelompok dan relasinya maka kebijakan tersebut tidak akan dikeluarkan.

Dan benar saja. Semua perilaku korupsi di kabupaten bangkalan tidak pernah lepas dari kekuasaan dan relasi-relasinya. Pada contoh pertama di data korupsi bangkalan. Ada korupsi ADD dan DD. Dalam hal ini

Begitu juga kasus korupsi yang menimpa kontraktor dan pihak devisi hokum kabupaten bangkalan dalam proyek pembangunan taman paseban di kabupaten bangkalan. Terungkapnya kasus dugaan korupsi tersebut, berawal dari hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara sebesar Rp 525 juta dalam pengerjaan proyek Taman Paseban. Dalam kasus tersebut setelah

KPK melakukan penangkapan terhadap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron (FAI) yang diduga menerima pemberian uang dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko (ABD). Selain itu, KPK juga menangkap 2 orang sebagai perantara keduanya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menyebutkan bahwa uang senilai Rp 700 juta dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu itu ditemukan pada seorang perantara dari Antonio yaitu Rauf (RF). Uang itu diduga merupakan hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Jawa Timur.

Berikut kronologi yang disampaikan oleh Bambang saat konferensi pers di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014):

Bertempat di parkir di Jl Bangka Raya, Jakarta Selatan, Gedung A dilakukan penangkapan terhadap Rauf dan ditemukan uang senilai Rp .juta dalam sebuah mobil 700 Diduga uang itu adalah pemberian dari Antonio untuk Fuad melalui Rauf (ajudan Antonio).

2. **Senin (1/12/2014) pukul 11.45 WIB**

Bertempat di lobi Gedung A di Jl Bangka Raya, Jakarta Selatan, dilakukan penangkapan terhadap Antonio

3. .Senin (1/12/2014) pukul 12.15 WIB

Bertempat di lobi Gedung EB, Jakarta dilakukan penangkapan terhadap Koptu Darmono (oknum TNI AL/perantara Fuad).

4. Selasa (2/12/2014) pukul 01.00 WIB

Bertempat di Bangkalan, Madura, dilakukan penangkapan terhadap Fuad di kediamannya. Selain itu juga disita uang sebanyak 3 tas koper besar (jumlahnya masih dihitung) yang diduga juga pemberian.

5. Selasa	(2/12/2014)	sekitar	pukul	10.00	WIB
-----------	-------------	---------	-------	-------	-----

Fuad dibawa ke Gedung KPK dan langsung menjalani pemeriksaan intensif.

Di dalam persidangan terungkap bila Fuad Amin meminta fee 10 persen APBD yang digunakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu dasawarsa.

"Fee 10 persen dari anggaran APBD yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2003-2010 sebesar Rp 159,126 miliar," kata ketua majelis Salman Luthan. Adapun fee dari anggaran APBD yang

diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2010-2013 sebesar Rp 182,574 miliar. Alhasil, fee 10 persen selama 10 tahun sebesar Rp 341 miliar.

Fuad Amin juga menjadi tersangkan dalam kasus suap migas. Suap bermula ketika PT MKS ketika hendak membeli gas alam di Blok Poleng, Bangkalan. Pada saat yang bersamaan, Perusahaan Daerah Sumber Daya (PD SD) juga menginginkan hal yang sama. Kemudian, Bambang melobi Fuad agar PT MKS dapat membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan. Fuad Amin pun sepakat untuk membantu Selain itu,

Fuad juga memberikan dukungan PT MKS kepada Kodeco Energy, Co Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Untuk merealisasikan permohonan tersebut, baik PT MKS maupun PD SD sepakat membuat nota perjanjian. Akhirnya, PT MKS dan PD SD menandatangani surat perjanjian konsorsium pemasangan pipa gas alam di Gresik dan Gili Timur.

Fuad Amin mengarahkan perjanjian konsorsium PT MKS dengan PD Sumber Daya dan memberikan surat dukungan permohonan alokasi Kodeco sehingga PT MKS memperoleh alokasi gas alam dari PT Pertamina EP. Tak berselang lama, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS. Pada tanggal 5 September 2007, PT Pertamina EP dan PT MKS menandatangani Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur, Madura.

Atas bantuan tersebut, Bambang menyetorkan duit dalam bentuk tunai dan melalui transfer ke beberapa rekening yang telah ditentukan oleh Fuad. Selain Fuad, untuk penyetoran duit tunai juga diserahkan melalui ajudannya, Abdul Rauf dan seseorang bernama Taufik. Setoran terbagi dalam dua kategori, yakni setoran bulanan dan setoran insidentil.

Bambang dalam sidang untuk terdakwa lainnya, sempat mengaku uang bulanan untuk Fuad ditransfer ke rekening Fuad sementara permintaan insidentil disetorkan ke rekening orang lain yang telah ditentukan Fuad.

Mulanya, Bambang menyerahkan duit sebanyak Rp 50 juta tiap bulan secara tunai. Duit diberikan sejak medio tahun 2009 hingga Juni 2011. Setelah itu, nominal duit pelicin melonjak empat kali lipat menjadi Rp 200 juta sejak Juli 2011 hingga akhir Desember 2013.

Tak berhenti di situ, melonjaknya duit suap kembali terjadi menjadi Rp 600 juta mulai Januari 2014 hingga November 2014. Selain duit rutin, PT MKS juga terbukti menyetor duit suap secara temporer. Duit yang disetor sedikitnya senilai Rp 6 miliar baik melalui sejumlah kerabat maupun langsung kepada dirinya.

Fuad didakwa melanggar Pasal 12a dan 12b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP



Motif akan hasrat selalu berkuasa jelas terpampang dari jejak rekam politiknya. Setelah dia melepas jabatan Bupati selama dua periode, fuad tidak serta merta membiarkan anaknya menjabat bupati. Akan tetapi fuad juga berhasrat tetap mengondisikan dengan cara menjadi ketua DPRD kabupaten Bangkalan.

Teori kausalitas mengajarkan pada kita, bahwa tidak ada kejadian tanpa ada sebab. Begitu juga dalam kehidupan social. Perlu diketahui tertangkapnya Fuad Amin melalui pernyataan Bambang selaku wakil KPK, Fuad Amin tertangkap atas laporan masyarakat.

Husus di bangkalan, penerapan pendidikan anti korupsi secara non formal oleh beberapa komunitas pemuda memberikan implikasi atau efek salah satunya sebagai berikut :

Korupsi sudah menggrogoti negara Indonesia di semua segmen dan sangat kompleks, bisa dikatakan setiap hari media social memberikan tontonan pada masyarakat bagaimana korupsi itu terjadi, sehingga kadang pula ada rasa menyerah dan tidak akan bisa membasmi korupsi di negara Indonesia. Namun dengan hadirnya pendidikan anti korupsi seakan memberikan udara segar dan harapan baru untuk membasmi perilaku korupsi, setidaknya pendidikan korupsi sebagai pemutus mata rantai generasi koruptif menuju generasi emas. Kenapa demikian, sebab pendidikan korupsi akan memberikan efek kesadaran semenjak dini, agar kita menjauhi perilaku korupsi. Negara kaya menjadi negara miskin. Negara yang seharusnya maju akan menjadi negara berkembang dan tertinggal. Dan yang paling terpenting korupsi adalah perilaku Haram yang dilarang agama.

kadang kala perilaku korupsi dilakukan karena atas dasar ketidak tahuan, seperti contoh memberikan hadiah pada pejabat. Menjanjikan uang apabila

pejabat membantu, padahal itu adalah tugasnya sebagai pejabat, pelayan public.

Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang telah disosialisasikan oleh teman-teman komunitas pemuda. Pada saat ini masyarakat bangkalan banyak mengetahui mana itu perilaku korupsi dan yang bukan korupsi. Contoh dipedesaan masyarakat sudah tau apa itu Pungli (pungutan liar) terutama yang hidup dikota-kota di kabupaten bangkalan. Mereka sudah sadar bahwa bukan hanya yang di sogok. Yang menyogok pun telah melakukan perilaku koruptif dan salah

### 3. Timbulnya gerakan masyarakat

Dulu di masa rezim Fuad amin gerakan masyarakat hingga mahasiswa nyaris tidak terdengar, walaupun pada saat ini praktek korupsi sudah menjadi rahasia umum. Sampai pada akhirnya banyak pemuda membuat komunitas dan adanya kebijakan pendidikan anti korupsi dari pemerintah. Hal ini sebagai symbol akademis untuk melakukan perlawanan yang legal secara yurisprudensi. Sehingga setelah pemuda membuat komunitas ditopang dengan kurikulum pendidikan anti korupsi. Timbullah gerakan masyarakat. Baik gerakan tersebut melalui media social maupun gerakan demonstrasi.

#### 4. Pejabat ketakutan

Seperti narasi sebelumnya, bahwa sebelum ada peran komunitas pemuda dalam pendidikan anti korupsi. Pejabat kabupaten bangkalan dengan gampang melakukan korupsi tanpa ada rasa takut dan hawatir di penjara. Namun setelah adanya pendidikan anti korupsi, dan puncaknya setelah fuad

amin ditangkap OTT oleh KPK para penguasa dan pejabat merasa ketakutan dengan gelombang gerakan masyarakat yang tau tentang korupsi. Sebab pemuda bangkalan saat ini tidak akan segan segan mendemo dan melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH)

5. Menjadi diskusi sehari hari

Jika dulu sebelum disahkannya pendidikan anti korupsi masyarakat seakan males dan tidak kejelasan tentang pendidikan korupsi akhirnya saat ini pemuda pemudi bangkalan sering berdiskusi dan dijadikan diskursus bersama tentang pendidikan anti korupsi

6. Pembentukan moral dan pemutus rantai generasi koruptif

Korupsi sudah di ibaratkan kecanduan sabu sabu pada saat ini. Mereka korupsi bukan hanya ada kesempatan, tetapi mereka membuat kesempatan dan peluang untuk melakukan korupsi. Sehingga sangat sulit untuk membenahi kondisi seperti ini. Maka solusinya adalah mengubah karakter dan memperkuat moralitas. Pendidikan anti korupsi merupakan solusi untuk memutus rantai generasi korupsi. Dengan penerapan pendidikan anti korupsi hal ini akan membentuk moral dan menjadikan generasi selanjutnya menjadi generasi yang bertanggung jawab, bermoral dan clean and good dan mereka berkata NO terhadap korupsi

**BAB V**

**PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

1. Teori Micehal Foucault (relasi kekuasaan) memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa kekuasaan sangatlah berpotensi untuk melakukan penyelewangan, dalam konteks korupsi kekuasaan merupakan actor absolute yang memberikan peluang melakukan tindak pidana korupsi, sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalau itu tidak “menguntungkan” pribadi, kelompok dan relasinya maka kebijakan tersebut tidak akan dikeluarkan.

Korupsi dan kekuasaan, merupakan hal yang selalu melekat. Banyak kejadian yang mengafirmasi Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan begitupun sebaliknya yang terjadi kekuasaan merupakan tangga bagi tindak korupsi. Dan hal itu pernah diungkapkan oleh Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)

Dan benar saja. Semua perilaku korupsi di kabupaten bangkalan tidak pernah lepas dari kekuasaan dan relasi-relasinya. Pada contoh pertama di data korupsi bangkalan. Ada korupsi ADD dan DD. Dalam hal ini melibatkan pihak kecamatan, dan aparatur desa di kecamatan

Dalam kasus ini, merupakan kongkalikong antara beberapa Relasi dari penguasa local. Dalam prakteknya dari pihak kecamatan akan memuluskan keluarnya DD dengan konsekuensi free 20%. Begitu juga setelah dipotong 20% dana <sup>122</sup> run ke desa dan akan direalisasikan sebesar 40%, dengan mengondisikan inspektorat dan APH yang menangani. Korupsi tersebut terjadi karena memang ada relasi sistemik yang sangat kental, sehingga sangat gampang dalam melakukan korupsi

Yang menjadi terpidana yaitu H Humaidi, pelaksana proyek; Karsono, pemborong; dan Panca Setiadi yang bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca Setiadi menjabat Kabid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan. Majelis hakim menyatakan, ketiga terpidana melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU 20/2001. Lagi-lagi kasus korupsi ini mengafirmasi bahwa

- Perjuangan teman-teman aktivis di kabupaten bangkalan membuahkan hasil. Selain bisa membuka tabir kepalsuan tentang korupsi. Komunitas pemuda juga memberikan efek takut kepada penguasa untuk sewenang-wenang melakukan tindak pidana korupsi

Itu terbukti setelah para pemuda aktivis sering melakukan edukasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi baik secara formal dan non formal, masyarakat umum banyak mengetahui apa itu korupsi dan apa itu bahaya korupsi

Husus di bangkalan, penerapan pendidikan anti korupsi secara non formal oleh beberapa komunitas pemuda memberikan implikasi atau efek





Anwar, Syamsul.*Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*.Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban PSAP, 2006.

Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.

Azhar, Muhammad, dkk. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta:LP3 UMY, 2004.

Azwar, Syaifuddin.*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

B.N,Agoes Patub.*Modul Seminar “Peran Komunitas Musik Etnik Dalam Agoes Patub B.N”*. Yogyakarta : Komunitas Suling Bambu Nusantara, 2011.

Badan Pusat Statistic Kabupaten Bangkalan.*Bangkalan dalam angka tahun 2014*.

Berens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Best, Steven,& Douglas Kellner, *Teori Postmodern, Interogasi Kritis*. Terj. Indah Rohmani. Malang: Boyan Publishing, 2003.

Cazurra, Alvaro Cuervo. “The Effectiveness of Laws Against Bribery Abroad.” *Journal of International Business Studies*. 2008.

Creswell, Jhon W. *Research Design Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj, Achmad Fawaid. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015.

Dharma,Budi.*Korupsi dan Budaya*. Kompas. 25/10/2015.

Ghafur, Syaiful Amin.*Merancang Kurikulum Pendidikan Antikorupsi*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol, 01, No. 01, Juni 2009.

Handoyo,Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya, 2009.

Harahap, Krisna.*Pemberantasan Korupsi Pada Masa Reformasi*dalam Jurnal of Historical Studies X Juni 2009.

Hasan, M. Iqbal.*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasbiansyah. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dalam Komunikasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.

- Kaffsoff. *Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat*. Terj. Soenarjo Soemargono. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996.
- Kaswardi, EM. K. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta : PT. Grasindo, 1993.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: t.p. 2009.
- Lodico, Marguerite G, dkk. *Methods in Educational Research From Theory to Practice*. San Fransisco: Jossey Bass, 2006.
- Majalah AULA No.01 tahun XXXI Januari 2009.
- Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota*. Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- McClelland, David C. *The Achieving Society*. NJ: Van Nostrand Company Inc, 1961.
- Modern Didactic Center. *Anti Corruption Education At School*. Vilnius Lathuania : Gerneish Publishing, 2008.
- Nasir, Ridlwan. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press & LKiS, 2006.
- Nasution. *Metodologi Research Penelitian Ilmia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Partanto, Pius A, & M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola, 2004.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesi, 1975.
- Soros, George. *Open Society; Reforming Global Capitalism*. Jakarta: t.p, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2004.

